

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu berlangsung sistematis. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan, maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2007:61). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek

ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Dalam banyak kasus di negara berkembang contohnya di Negara Indonesia atau khususnya di Provinsi DIY sendiri pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan. Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Indeks ketimpangan di Provinsi DIY menunjukkan bahwa ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi DIY selama tahun 1993-2003 cenderung meningkat. Bahwa kesenjangan pendapatan perkapita di Provinsi DIY pada periode 1993-2003 selalu meningkat, bahkan meskipun berdasarkan nilai indeks Williamson dan Indeks ketimpangan pada tahun 1998 mengalami penurunan, tetapi rasio pendapatan tertinggi dan terendah tidak menunjukkan hal serupa. Hal ini disebabkan kabupaten Kulon Progo mengalami keterpurukan ekonomi pascakrisis ekonomi dan waktu yang dibutuhkan dalam proses *recovery* sangat lama. Masalah fundamental yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi DIY adalah kemiskinan dan ketimpangan, di mana ada kecenderungan bahwa ketimpangan ini meningkat sepanjang waktu. Ada daerah yang relative sangat kaya (kota Yogyakarta) dan ada daerah yang relatif miskin (kabupaten Kulon Progo). Peningkatan ketimpangan ini disebabkan oleh pola pembangunan yang berbeda antardaerah (Restiatun, 2009).

Petunjuk awalnya adalah golongan kaya makin kaya, sedangkan kaum miskin makin miskin, wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan, sedangkan sektor non unggulan yang membebani. Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang

meningkat dan distribusi pendapatan yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi daerah.

Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama karena disebabkan oleh kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, dan kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas dan prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja, yang terampil disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tingkat pendapatan daerah perkapita merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Di dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan regional, maka PDRB atau pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat krusial dan yang harus dicapai. Suatu hal yang tidak mengherankan, jika pada awal pembangunan ekonomi suatu daerah, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi dan fokus pada masalah pertumbuhan. Pada awal proses pembangunan, pertumbuhan PDRB menjadi sangat penting untuk daerah seperti Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang

jumlah penduduknya cukup besar dan tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi yang ditambah lagi dengan kenyataan bahwa besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pembangunan yang bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi (peningkatan PDRB). Perbedaan tingkat pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah kabupaten/kota yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah kabupaten/kota semakin besar.

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka diduga terjadi pertumbuhan PDRB dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata tiap Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, maka penulis tertarik meneliti masalah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dengan judul **"Analisis Sektor Unggulan dan Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2013"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah klasifikasi daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2004-2013?

2. Bagaimanakah sektor unggulan berdasarkan *Indeks LQ* yang diukur dari PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dalam tahun 2004-2013?
3. Bagaimanakah ketimpangan pembangunan berdasarkan Indeks Williamson yang diukur dari PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dalam tahun 2004-2013?

1.3. Keaslian Penelitian

Penelitian Restiatun (2009) dengan judul “Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan antar Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2003”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, analisis disparitas antara kabupaten juga dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Location Quotient*, *Tipologi Klassen*, *Indeks Williamson*, dan *Indeks Entropi Theil*. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan disparitas ini meningkat dari waktu ke waktu, Kota Yogyakarta dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh, sedangkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, termasuk dalam klasifikasi daerah yang relatif terpencil. Provinsi DIY terjadi ketidakseimbangan *trend* naik. Kemudian Sleman dan Gunungkidul termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat. Rasio dihitung dari pendapatan per kapita tertinggi dan terendah di wilayah Provinsi DIY menunjukkan *trend* perbaikan.

Penelitian Barika (2012) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005 -2009”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan

Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Variabel yang digunakan meliputi Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Penduduk, dan Investasi Swasta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi menurut tipologi Klassen dan menggambarkan tingkat kesenjangan regional antara kabupaten dan antar wilayah dalam kabupaten/kota di provinsi tersebut. Metode analisis yang digunakan meliputi Analisis Regresi, Analisis Klassen Typology Pertumbuhan Ekonomi, dan ketimpangan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) 0,570, hasil juga menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penduduk (X_2) dan Investasi Swasta (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan Daerah di Provinsi Bengkulu. Sementara itu pengeluaran pemerintah (X_1) tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Mopanga (2011) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi; ketidakseimbangan pembangunan yang dihasilkan dari ketidakseimbangan proporsional dalam PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Belanja Infrastruktur; bentuk pengembangan hubungan dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan memberikan rekomendasi kebijakan. Analisis ini menggunakan Indeks Williamson, Rasio Gini, *Shift-Share*, Klassen Tipologi dan Regresi Panel seimbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan lebih rendah dari non-pertanian, tetapi pertanian masih dominan dalam struktur ekonomi. Potensi sektor dan pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi di wilayah sektor sekunder dan tersier yang terjadi menunjukkan pergeseran struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo selama periode 2001-2008. Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Kota memiliki ekonomi yang kompetitif, termasuk di Kuadran I pada matriks tipologi

Klassen (pertumbuhan tinggi dan berpenghasilan tinggi), sementara Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango di Kuadran III (pertumbuhan rendah dan berpenghasilan rendah). Secara simultan dan parsial, perbedaan semua variabel independen yang signifikan sebagai sumber utama ketidaksetaraan.

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya Restiatun (2009), Barika (2012), dan Mopanga (2011) terdapat perbedaan periode penelitian yaitu periode tahun 1993-2003, periode tahun 2005-2009, dan periode tahun 2001-2008, sedangkan penelitian ini periode tahun 2004-2013, kemudian perbedaan variabel pertumbuhan penduduk, investasi swasta, lokasi penelitian yang berbeda, dan beberapa alat analisis seperti Rasio Gini, *Shift-Share*, dan Regresi Panel.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui klasifikasi daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dalam tahun 2004-2013.
2. Mengetahui sektor unggulan berdasarkan *Indeks LQ* yang diukur dari PDRB Provinsi DIY dalam tahun 2004-2013.
3. Mengetahui ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson yang diukur dari PDRB per Kapita antar kabupaten/kota di Provinsi DIY dalam tahun 2004-2013.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

1. Bagi Pemerintah Provinsi DIY

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi Pemerintah Daerah di Provinsi DIY dalam menentukan kebijakan khususnya dalam penganggulan ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi DIY.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar dan derajat kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.